

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DR ATAS PERBUATAN
MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) TANPA SURAT IZIN
PENGANGKUTAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

Nama : Diajeng Larasati

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : 1. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.

2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan DR dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hal mengangkut bahan bakar minyak (solar) tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan mengangkut minyak tanpa izin usaha pengangkutan diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada awalnya DR mengangkut bahan bakar minyak menggunakan di Perairan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin lalu ada KP. Anis Macan yang melakukan kegiatan kepolisian di Perairan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal MS.JK yang merupakan kapal milik DR dan didapati sejumlah bahan bakar minyak di atas kapal milik DR. DR hanya dapat memperlihatkan 4 (empat) lembar surat jalan dari PT.TK dan 4 (empat) surat pengantar pengiriman depot Jambi, dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut DR tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang resmi berupa izin usaha pengangkutan dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral. Terdapat pernyataan DR yang menyatakan bahwa DR tidak mengetahui bahwa harus ada surat izin usaha pengangkutan dari Menteri ESDM dan teman DR yang menjadi saksi dalam persidangan juga menyebutkan bahwa DR baru sekali mengangkut bahan bakar minyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa DR dapat dinyatakan lalai meskipun adanya istilah hukum berupa fiksi hukum dimana semua orang dianggap tahu hukum. DR tidak mendapatkan sosialisasi dari PT yang menyuruhnya untuk mengangkut BBM tersebut sehingga DR tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membawa surat izin usaha pengangkutan BBM dari Menteri ESDM. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbuatan DR memenuhi unsur didalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata kunci: Nakhoda, izin usaha pengangkutan, pengangkutan bahan bakar minyak

*CRIMINAL LIABILITY OF DR FOR TRANSPORTING FUEL OIL (SOLAR)
WITHOUT TRANSPORTATION PERMIT BASED ON PROVISIONS OF LAW
NUMBER 22 IN 2001 ABOUT OIL AND GAS*

Name : Diajeng Larasati

Discipline / Study Programme : Law / Law Degree

*Contributors : : 1. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to knowing whether DR's action can be subject to criminal liability for transporting fuel oil (solar) without transportation business permit. As for Act of transporting fuel oil without transportation business permit is regulated in article 53, letter b, of law number 22 of 2001 about oil and gas.

At the beginning DR transporting the fuel oils on the Lilin river, in Banyuasin districts and then there is a KP. Anis Macan that carry out police activities on the Lilin river, Banyuasin districts and conduct an inspection on MS.JK boat which belongs to DR and found some fuel oil on boat that owned by DR.

DR only can shows 4 (four) sheets of travel documents from the company / [PT.TK](#) and 4 (four) shipping delivery letters from Jambi depot, in transporting the fuel oil (solar) DR does not completing with letters or official documents in the form of a transportation business permit from the Government cq. Minister of Energy and Mineral Resources (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).

There is a statement from DR, stating that DR did not know that he must have a transportation business permit from the Government / Minister of ESDM and a friend of DR who was a witness at the trial mention that DR has only transported fuel oil once. This shows that DR can be declared negligent eventhough there is the existence of legal terms in the form of legal fiction where is everybody considered to know the law.

DR did not get socialization from the company / PT who hired him to transporting the fuel oils so that DR can not fulfill his obligation to bring permit for fuel oil transportation business from Minister of ESDM.

This also shows that the action of DR is fulfilled the elements in article 53, letter b, of law number 22 in 2001, about oil and gas.

Keywords: Captain, Transportation Business Permit, Transporting fuel oil